



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **LUKI ZAIMAN PRAWIRA**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH**
3. NHK : **59982**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.280.800.000**

1. Tanah Seluas 390 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , Rp. 312.000.000
2. Tanah Seluas 800 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 800 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 358 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 296 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , Rp. 100.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 800 m2/240 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
7. Tanah Seluas 2.500 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
8. Tanah Seluas 22.350 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 158.800.000
9. Tanah Seluas 20.000 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
10. Tanah Seluas 900 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
11. Tanah dan Bangunan Seluas 25 m2/25 m2 di KAB / KOTA KOTA



BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 150.000.000

1. MOBIL, HONDA HR-V Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 1.006.100.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 813.131.413

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 5.250.031.413

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 5.250.031.413

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.